



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA
MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PADA
PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN 2015-2020**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Jogi Rahmat Santoso

022116245

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

JUNI 2022



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA
MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PADA
PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN 2015-2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M.,CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., CA., CSEP.,QIA, CFE.)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA
MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PADA
PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN 2015-2020**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022

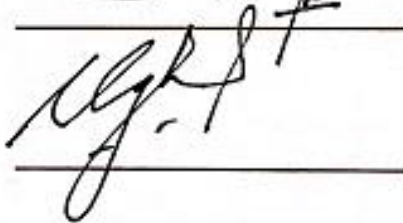
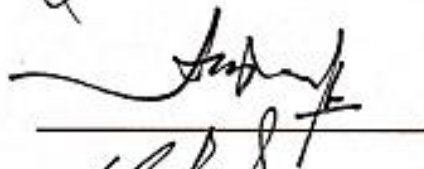
Jogi Rahmat Santoso
02211645

Disetujui

Ketua Penguji Sidang,
(Drs. Monang Situmorang, Ak., MM, CA.)

Ketua Komisi Pembimbing
(Ahmad Burhanudin Taufiq, Ak., ME., CA.)

Anggota Komisi Pembimbing
(Sigit Edi, Drs., AK., MM.)



PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jogi Rahmat S
NPM : 0221 16 245
JudulSkripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Pada Pemerintah Kota Bogor 2015-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juni 2022


METERAI
TEMPEL
0221162457333
Jogi Rahmat Santoso
0221 16 245

©Hak Cipta Milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dan bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SIDANG SKRIPSI

Kami selaku Ketua Komisi dan Anggota Komisi telah melakukan bimbingan skripsi mulai tanggal: / / dan berakhir tanggal: / /

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama : Jogi Rahmat Santoso (L/P*)
NPM : 022116245
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik
Ketua Komisi : Ahmad Burhanudin Taufiq, Ak.,CA.,ME CA
Anggota Komisi : Sigit Edi, Drs., AK., M.M.
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Pada Pemerintah Kota Bogor 2015-2020

Menyetujui bahwa nama tersebut di atas dapat disertakan mengikuti ujian sidang skripsi yang dilaksanakan oleh pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Disetujui,

Ketua Komisi Pembimbing

(Ahmad Burhanudin Taufiq, Ak.,ME.,CA.)



Anggota Komisi Pembimbing

(Sigit Edi, Drs., AK., M.M.)



ABSTRAK

Jogi Rahmat Santoso. 022116245. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Pada Pemerintah Kota Bogor 2015-2020. Dibawah bimbingan Ahmad Burhanudin Taufiq dan Sigit Edi. 2022.

Kemandirian keuangan daerah dipahami sebagai upaya pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah, pembangunan, pelayanan bagi masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi. Penelitian ini dilandasi oleh adanya perbedaan pengaruh kenaikan dan penurunan antara variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan Kota Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan Kota Bogor.

Penelitian ini menggunakan data laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Bogor tahun 2015-2020. Pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling* di mana penelitian yang dilakukan berupa studi *time series* selama 6 tahun dengan unit data tahunan. Data diuji dengan menggunakan SPSS versi 25. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

Hasil analisa menyimpulkan bahwa secara parsial hanya pendapatan asli daerah yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan, sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan dan secara simultan pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan, sehingga diprediksi bahwa peningkatan pendapatan asli daerah dan belanja modal secara bersamaan dapat meningkatkan kemandirian keuangan.

Kata Kunci: PAD, Belanja Modal, Kemandirian Keuangan.

ABSTRACT

Jogi Rahmat Santoso. 022116245. The Effect of Regional Original Income and Capital Expenditure on Financial Independence in the Bogor City Government 2015-2020. Under the guidance of Ahmad Burhanudin Taufiq and Sigit Edi. 2022.

Regional financial independence is understood as the local government's efforts to finance local government activities, development, services for people who have paid taxes and levies. This research is based on the difference in the effect of the increase and decrease between the variables of local revenue and capital expenditure on the financial independence of the city of Bogor. The purpose of this study was to determine the effect of local revenue and capital expenditure on the financial independence of the city of Bogor.

This study uses data from the Bogor City government budget realization reports for 2015-2020. The sampling used was non-probability sampling where the research was conducted in the form of a time series study for 6 years with annual data units. The data was tested using SPSS version 25. The data processing and analysis methods used were classical assumption test, multiple linear regression test, and hypothesis testing.

The results of the analysis conclude that partially only local revenue has a positive and significant effect on financial independence, while capital expenditures have no effect on financial independence and simultaneously local original income and capital expenditures have a positive and significant effect on financial independence, so it is predicted that an increase in original income regions and capital expenditures can simultaneously increase financial independence.

Keywords: *PAD, Capital expenditure, Financial independence.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Pada Pemerintah Kota Bogor 2015-2020”**. Dalam masa-masa penulisan, penulis tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi dapat terwujud, Perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Dr. Hendro Sasongko, Ak.,M.M.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
2. Dr. Arif Tri Hardiyanto, Ak.,MBA.,CMA.,CCSA.,CA.,CSEP.,QIA selaku ketua program studi.
3. Ahmad Burhanudin Taufiq, Ak.,ME.,CA selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan dukungan serta saran-saran yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sigit Edi, Drs.,Ak.,MM selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan dukungan serta saran-saran yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu-ilmu yang berguna dan bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
6. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan materil dalam penyelesaian penulisan skripsi.
7. Kamila Khairunnisa yang selalu memberikan support, semangat dan tempat berkeluh kesah selama penulisan skripsi ini.
8. Dede, Wahyu, Azis, Vonda, Ucup, Begi, Ami dan sahabat lainnya yang selalu memberikan support dan saling menyemangati selama penulisan skripsi ini.
9. Teman kelas G akuntansi angkatan 2016 yang telah berbagi kenangan dan memberikan pengalaman yang berarti terimakasih dan semangat sama-sama menyusun proposal penelitian ini.
10. Teman-teman akuntansi angkatan tahun 2016 yang telah memberikan pengalaman sangat berarti selama perkuliahan.
11. Teman seperjuangan bimbingan Bapak Burhanudin Taufiq dan Bapak Sigit yang telah memberikan masukan serta saran yang sangat membantu dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan bahkan menerima kritik dan saran. Semoga proposal penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bogor, Juni 2022

Jogi Rahmat Santoso

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iii
©Hak Cipta Milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
UJIAN SIDANG SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Maksud Penelitian.....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Praktis	6
1.4.2 Kegunaan Akademis	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Akuntansi Pemerintah.....	7
2.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintah.....	7
2.1.2 Komponen Laporan keuangan Pemerintah	7
2.1.3 Prinsip-prinsip Keuangan Daerah	7

2.1.4	Komponen Laporan Keuangan Daerah.....	8
2.2	Pendapatan Daerah.....	9
2.2.1	Pengertian Pendapatan Daerah.....	9
2.2.2	Sumber Pendapatan Daerah	9
2.3	Pendapatan Asli Daerah.....	10
2.3.1	Pengertian Pendapatan Asli Daerah	10
2.3.2	Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	10
2.3.3	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.....	13
2.4	Belanja Daerah.....	13
2.4.1	Pengertian Belanja Daerah.....	13
2.4.2	Kebijakan Belanja Daerah	13
2.5	Belanja Modal.....	15
2.5.1	Pengertian Belanja Modal	15
2.5.2	Manfaat Belanja Modal.....	15
2.5.3	Jenis-jenis Belanja Modal	15
2.5.4	Karakteristik Belanja Modal	16
2.5.5	Rasio Belanja Modal	17
2.6	Kemandirian Keuangan Daerah.....	17
2.6.1	Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah	17
2.6.2	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	18
2.7	Peneliti Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran.....	19
2.7.1	Peneliti Sebelumnya.....	19
2.7.2	Kerangka Pemikiran.....	23
2.7.2.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan	23
2.7.2.2	Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan	24
2.7.2.3	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan	24
2.8	Hipotesis Penelitian	25
BAB III.....		26
METODE PENELITIAN		26
3.1	Jenis Penelitian.....	26
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	26
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian	26
3.4	Operasional Variabel.....	26
3.5	Metode Penarikan Sampel	27

3.6	Metode Pengumpulan Data.....	28
3.7	Metode Pengolahan Data/Analisis Data.....	28
3.7.1	Statistik Deskriptif	28
3.7.2	Uji Asumsi Klasik.....	28
3.7.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	29
3.7.4	Uji Hipotesis	30
BAB IV	31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	31
4.2	Hasil Pengumpulan Data.....	31
4.2.1	Data Pendapatan Asli Daerah	31
4.2.2	Data Belanja Modal	32
4.2.3	Data Kemandirian Keuangan	33
4.3	Analisis Data.....	34
4.3.1	Uji Asumsi Klasik.....	34
4.3.2	Analisis Regresi Linear Berganda.....	36
4.3.3	Uji Hipotesis	37
4.4	Pembahasan.....	40
4.4.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan	40
4.4.2	Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan	40
4.4.3	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan	41
BAB V	42
KESIMPULAN DAN SARAN	42
5.1	Kesimpulan	42
5.2	Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	44
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	46
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	: Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bogor	3
Tabel 1. 2	: Pertumbuhan Belanja Modal Pemerintah Kota Bogor.....	3
Tabel 2. 1	: Rumus Pendapatan Asli Daerah	13
Tabel 2. 2	: Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	13
Tabel 2. 3	: Rumus Belanja Modal	17
Tabel 2. 4	: Rasio Belanja Modal.....	17
Tabel 2. 5	: Rumus Rasio Kemandirian	18
Tabel 2. 6	: Tingkat Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah	18
Tabel 2. 7	: Penelitian Sebelumnya.....	19
Tabel 3. 1	: Operasionalisasi Variabel	27
Tabel 4. 1	: Rekapitulasi Data Pendapatan Asli Daerah Periode 2015-2020.....	31
Tabel 4. 2	: Rasio Pendapatan Asli Daerah Periode 2015-2020	32
Tabel 4. 3	: Rekapitulasi Belanja Modal Periode 2015-2020	32
Tabel 4. 4	: Rasio Belanja Modal Periode 2015-2020	32
Tabel 4. 5	: Rekapitulasi Kemandirian Keuangan Periode 2015-2020.....	33
Tabel 4. 6	: Rasio Kemandirian Keuangan Periode 2015-2020.....	33
Tabel 4. 7	: Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Daerah.....	33
Tabel 4. 8	: Output Uji Normalitas.....	34
Tabel 4. 9	: Output Uji Multikolinearitas.....	35
Tabel 4. 10	: Output Uji Heteroskedastisitas	35
Tabel 4. 11	: Output Uji Autokorelasi.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 12	: Analisa Regresi Berganda.....	36
Tabel 4. 13	: Output Uji Simultan.....	38
Tabel 4. 14	: Output Uji Determinasi.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 : Perbandingan Belanja Modal dan Belanja Pegawai Pemerintah Kota Bogor 2015-2020	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 1 : Kerangka Pemikiran	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Tabel Laporan Keuangan 2015-2020.....	47
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja tahun 2015-2016.....	48
Lampiran 3 : Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja tahun 2017-2018.....	50
lampiran 4 : Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja tahun 209-2020	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Penelitian

Indonesia telah melaksanakan otonomi daerah yang mulai diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia yang sampai saat ini mengalami beberapa kali perubahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan serta bertanggungjawab. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 pasal 4. APBN dan APBD merupakan inti dari keuangan (akuntansi) pemerintahan karena anggaran merupakan informasi keuangan paling penting yang dihasilkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kedudukan APBN dan APBD dalam keuangan pemerintahan menjadi penting (Halim & Syam, 2014).

Penyelenggaraan desentralisasi yang terkait dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang isinya memberi wewenang untuk mengurus pemerintahannya masing-masing dan memberikan peluang untuk menggali potensi lokal agar terwujudnya kemandirian keuangan daerah bagi daerah tersebut. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditunjukkan oleh kemampuan keuangan daerahnya yang dilihat dari besar dan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding dengan pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah.

Pemerintah memiliki peran dalam mencapai sasaran tujuan pembangunan yaitu sebagai katalisator dan fasilitator. Dalam mencapai tujuannya tersebut pemerintah daerah memerlukan sarana dan fasilitas pendukung yang direalisasikan melalui belanja modal guna meningkatkan pelayanan publik. Berkaitan dengan pelayanan publik, alokasi belanja modal merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan meningkatkan produktivitas perekonomian daerah. Semakin banyak belanja modal maka semakin tinggi pula produktivitas perekonomian pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Akan tetapi dengan melihat fenomena umum yang terjadi, sepertinya alokasi belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksanakan

bagi pemenuh kesejahteraan publik, dikarenakan pengelolaan belanja daerah terutama belanja modal masih belum terorientasi pada publik.

Kemandirian keuangan daerah dapat tercipta apabila pemerintah daerah dapat mengelola Pendapatan Asli Daerah secara efektif dan efisien. Namun yang terjadi saat ini, pemerintah daerah di Indonesia memiliki proporsi Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan yang masih mendominasi dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah.

Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun RI, 2010), menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dikategorikan kedalam belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (aset tetap). Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Kota Bogor merupakan salah satu Kota yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan otonomi daerah. Dengan penyerahan wewenang tersebut tentunya pemerintah pusat berharap agar Kota Bogor dapat menggali potensi daerahnya, sehingga dapat mengurangi ketergantungan fiskal dan subsidi dari pemerintah pusat, akan tetapi kenyataannya masih banyak permasalahan yang dihadapi Kota Bogor dalam hal sarana, prasarana dan infrastruktur. Pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Bogor, dituntut untuk mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki agar bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana dan prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Selain itu pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana mengatakan di bidang pendapatan, sejak 2015 hingga 2019 penerimaan pajak daerah Kota Bogor secara signifikan meningkat. Bahkan, dalam kurun waktu 2018 ke 2019 kenaikannya diatas 10%, tepatnya sekitar 16%. Jika melihat realisasi tahun 2019, naik sekitar 6,69%. Dalam kurun tersebut, capaian persentase realisasi paling tinggi berada pada tahun 2015 ke tahun 2016 sekitar 23% dan yang kedua berada di tahun 2019 sekitar 16%.

Dari penjelasan tersebut yang dapat diambil, bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Sehingga perlu dilihat kinerja Pendapatan Asli Daerah tersebut melalui perbandingan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan. Apabila realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah lebih besar dari pada Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah maka dapat dikatakan kinerja Pendapatan Asli Daerah dari suatu daerah tersebut semakin efektif (Ernawati & Riharjo, 2017).

Berikut ini adalah pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pemerintah Kota Bogor tahun 2015-2020:

Tabel 1. 1
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kota Bogor tahun 2015-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Persentase
2015	627.597.050.141,00	15%
2016	783.873.587.219,00	25%
2017	978.197.741.947,33	25%
2018	912.197.971.288,85	-7%
2019	1.015.884.216.919,86	11%
2020	872.017.242.152,12	-14%
Rata-rata		9%

Sumber: (www.kotabogor.go.id) data diolah penulis (2020)

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Bogor mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9% per tahun. Sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan pada Pemerintah Kota Bogor.

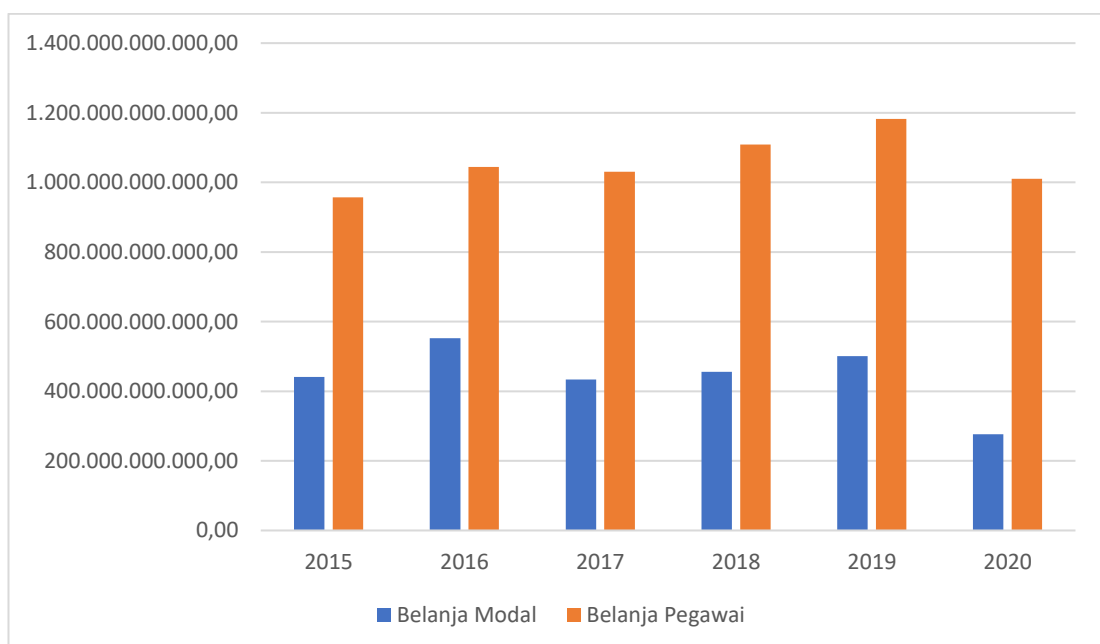
Tabel 1. 2
Pertumbuhan Belanja Modal
Pemerintah Kota Bogor tahun 2015-2020

Tahun	Belanja Modal	Persentase
2015	440.919.551.227,00	-8%
2016	552.484.517.036,00	35%
2017	433.491.716.724,00	-14%
2018	455.461.723.593,00	10%
2019	501.033.407.778,00	15%
2020	276.157.283.029,00	-21%
Rata-rata		3%

Sumber: (www.kotabogor.go.id) data diolah penulis (2020)

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bogor mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3% per tahun. Belanja Modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap seperti pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Apabila sarana dan prasarana daerah memadai, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada produktivitas ekonomi yang semakin meningkat. Artinya, jika belanja modal meningkat maka akan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Gambar 1. 1
Perbandingan Belanja Modal dan Belanja Pegawai
Kota Bogor 2015-2020



Akan tetapi faktanya dalam anggaran pendapatan dan belanja, porsi belanja pegawai masih lebih besar dari pada belanja modal. menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah Kota Bogor dari tahun 2015-2020 cenderung lebih besar dialokasikan untuk belanja pegawai daripada dialokasikan untuk belanja pembangunan. Besarnya belanja pegawai dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengeluaran daerah yang kemudian dapat membebani stabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, dapat menghambat laju pembangunan daerah sehingga harapan untuk dapat meningkatkan kemandirian daerah akan sulit tercapai. Dalam penelitian sebelumnya dikatakan bahwa belanja modal sebagai kegiatan investasi pemerintah daerah, yang dapat menambah aktiva tetap yang dimiliki daerah dan mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan dalam jangka panjang yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah beberapa tahun kemudian (Antari & Sedana, 2018).

Salah satu aspek penting pelaksanaan kewenangan otonomi daerah adalah mengetahui tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui peningkatan potensi penerimaan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, menggambarkan bahwa

pemerintah daerah telah mampu meningkatkan kemampuan keuangan yang berasal dari daerah lokal serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dana pemerintah pusat.

Artikel ayo Bogor, Selasa 16 Juli 2019 - menyatakan bahwa sumber-sumber pendanaan pembangunan non APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di antaranya APBN (Dana transfer dan belanja DIPA K/L di Daerah), tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP), kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), dan sumber pendanaan lainnya (Pinjaman/hibah luar negeri & obligasi daerah). Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah mendorong Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagin) Kota Bogor lincah bergerak menarik dana transfer untuk meningkatkan pendapatan dalam membiayai pembangunan di Kota Bogor.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah tetapi pada kenyataannya banyak daerah yang masih tergantung pada dana transfer dari pusat karena minimalnya PAD. Fenomena ini perlu dikaji, karena jika dilihat berdasarkan data yang ada, potensi ekonomi yang dimiliki daerah untuk mengembangkan PAD masih cukup besar, namun potensi-potensi tersebut belum dapat digali dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati & Riharjo (2017) dan Saleh(2020) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan, namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjahjono & Oktavianti (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ariani & Putri (2016) dan Ernawati and Riharjo (2017) menyatakan bahawa belanja modal berpengaruh positif terhadap keamdirian keuangan dan penelitian yang dilakukan oleh Yulihantini., et al. (2018) Belanja modal tidak berpengaruh terhadap Kemandirian.

Berdasarkan data yang sudah diolah sementara dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan pada Pemerintah Kota Bogor tahun 2015-2020”**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Adanya perbedaan pengaruh kenaikan dan penurunan antara variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan.
2. Pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah Kota Bogor cenderung lebih besar dialokasikan untuk belanja pegawai daripada dialokasikan untuk belanja pembangunan.
3. Adanya perbedaan atau ketidakkonsistenan hasil penelitian antara peneliti satu dengan peneliti lainnya.

1.2.2 Perumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bogor tahun 2015-2020?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bogor tahun 2015-2020?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bogor tahun 2015-2020?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Untuk menganalisis keterkaitan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan. Kota Bogor belum sepenuhnya mandiri dikarenakan masih terdapat bantuan dana dari pemerintah pusat, sehingga saya ingin mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Kota Bogor tahun 2015-2020.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan maksud penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan pada Pemerintahan Kota Bogor tahun 2015-2020.
2. Mengetahui pengaruh Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan pada Pemerintahan Kota Bogor tahun 2015-2020.
3. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan pada Pemerintahan Kota Bogor tahun 2015-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Bogor dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat, kinerja, pelayanan serta kemandirian keuangan Kota Bogor.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan wawasan mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan, serta dapat dijadikan referensi dan perbandingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Kemandirian Keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Pemerintah

2.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintah

Menurut Halim & Kusufi (2014) Akuntansi pemerintah adalah merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan yang dijadikan informasi dalam rangkap pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan. Sedangkan menurut Mahmudi (2016) Akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur manual atau terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan organisasi pemerintah.

2.1.2 Komponen Laporan keuangan Pemerintah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Halim & Kusufi (2014), Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota, Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah.

2.1.3 Prinsip-prinsip Keuangan Daerah

Menurut Halim & Kusufi (2014), terdapat beberapa prinsip-prinsip keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

b. Value for Money

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

- c. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (Probity)
Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi diminimalkan.
- d. Transparansi
Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal *accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
- e. Pengendalian
Pendapatan dan Belanja Daerah harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.

2.1.4 Komponen Laporan Keuangan Daerah

Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, seorang kepala daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Laporan Keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Adapun komponen-komponen laporan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri atas pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.
2. Neraca
Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (*assets*), utang (*liabilities*) dan modal sendiri (*owners equity*) dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya pada saat buku ditutup yakni akhir bulan, akhir triwulan, atau akhir tahun. Laporan posisi keuangan, atau disebut juga dengan

neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban, adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik pada satu saat tertentu.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pemerintah selama suatu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan dan kegiatan investasi. Selain itu laporan arus kas juga menampilkan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.2 Pendapatan Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Daerah

Standar Akuntansi Pemerintah tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis mendefinisikan pendapatan daerah adalah “Pendapatan sebagai semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran Bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2.2.2 Sumber Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah membawa dampak dalam pengelolaan keuangan daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus keuangannya sendiri. Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lancar maka pemerintah mengaturnya dalam undang-undang RI nomor 23 tahun 2014 pemerintah daerah pasal 155 sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dana beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah negara
3. Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana ayat (1) Dilakukan secara terpisah dari administrasi perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan berbagai tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 285 sumber pendapatan bagi daerah terdiri atas:
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah

2.3 Pendapatan Asli Daerah

2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah menurut ketentuan umum undang-undang RI No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 1 adalah “Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Pendapatan asli daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah yang mengali pendanaan melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Halim & Kusufi (2014) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang bersal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD (UU No.23/2014), yaitu:

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan

perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif (UU No.28.2009).

Menurut (UU No.28/2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak Kota/Kabupaten:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Bantuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walat
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah, yang selanjutnya retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Retribusi Daerah untuk masing-masing Kota/Kabupaten dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi Anggaran APBD. Jenis retribusi daerah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- 1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kakus
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2) Jenis Retribusi Jasa usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Penyelenggaraan di Air
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah pendapatan dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan ini tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang melangkah atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah di luar pemerintah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba usaha yang telah diuraikan diatas. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa Giro.
- c. Pendapatan Bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah

Tabel 2. 1
Rumus Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah	=	Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
------------------------	---	---

Sumber: Halim&Kusufi,2014

2.3.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas PAD	=	$\frac{\text{Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}} \times 100\%$
-----------------------	---	--

Sumber: Mahmudi,2016

2.4 Belanja Daerah

2.4.1 Pengertian Belanja Daerah

Didalam keuangan daerah juga terdapat kewajiban-kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang yang tercermin dalam pengeluaran daerah titik kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas aset dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap aset kewajiban-kewajiban pemerintah daerah tersebut dapat terpenuhi melalui pengeluaran atau belanja daerah.

Pengertian belanja daerah menurut Undang-undang RI No.33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

2.4.2 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-undang RI No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan dan jenis belanja.selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI pasal 27 Tahun 2005 yaitu:

1. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah.
2. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari:
 - a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintah.
 - b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan daerah.

3. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja barang dan jasa
 - c. Belanja modal
 - d. Bunga
 - e. Subsidi
 - f. Hibah
 - g. Bantuan sosial
 - h. Belanja bagi Hasil dan bantuan keuangan
 - i. Belanja tidak terduga

Sedangkan di dalam Pemandagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bagaimana belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan dan kelompok.

- 1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
 - A. Belanja menurut urusan wajib mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera sosial tenaga kerja koperasi dan usaha kecil dan menengah penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum kepegawaian pemberdayaan masyarakat dan desa, statis arsip dan komunikasi informatika.
 - B. Belanja menurut urusan pilihan mencakup; pertanian kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.
- 2) Belanja menurut organisasi disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 3) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah.
- 4) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.
 - A. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
 - B. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

2.5 Belanja Modal

2.5.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, menyatakan bahwa anggaran belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi aset minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Pemandagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Sedangkan menurut Halim & Kusufi (2014), menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

2.5.2 Manfaat Belanja Modal

Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam mengelola belanja modal ini pemerintah daerah harus didasarkan ada prinsip efektivitas, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah.

Aset tetap merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

2.5.3 Jenis-jenis Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), menjelaskan bahwa belanja modal dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) yang dikategorikan utama, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, baik nama dan sewa tanah, pengosongan,

pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan atau penggantian dan termasuk pengeluaran dan perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan dimaksud dengan kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian atau peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan dan pengelolaan Jalan Irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal aset dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan pengawasan dan pengelolaan pembangunan aset dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, aset dan bangunan dan jalan irigasi dan jaringan titik termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum hewan ternak dan tanaman buku-buku dan jurnal ilmiah.

2.5.4 Karakteristik Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi titik untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak. Titik maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

1. Aset tetap memiliki ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut: berwujud akan menambah aset pemerintah mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri/karakteristik aset lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material.
2. Kriteria kapitalisasi aset tetap, diharapkan entitas dapat menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi suatu aset tetap atau aset

lainnya, sehingga pejabat/aparat menyusun anggaran dan/atau penyusun laporan keuangan pemerintah mempunyai pedoman dalam penetapan belanja modal baik waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:

- 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah.
- 2) Pengeluaran melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Tabel 2. 3
Rumus Belanja Modal

$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Lainnya}$
--

Sumber: Halim&Kusufi,2014

2.5.5 Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Rasio Belanja Modal

$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$
--

Sumber: Mahmudi,2016

2.6 Kemandirian Keuangan Daerah

2.6.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan UU nomor 23 tahun 2014, menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang

lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. (Halim & Kusufi, 2014).

2.6.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Rumus Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{(\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi}) + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2016

Untuk melihat tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2. 6
Tingkat Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100 %	Sangat efektif
100 %	Efektif
90 % - 99 %	Cukup efektif
75 % - 89 %	Kurang efektif
< 75 %	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi, 2016

2.7 Peneliti Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.7.1 Peneliti Sebelumnya

Tabel 2. 7
Peneliti Sebelumnya

No.	Nama, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Pratiwi (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Belanja Modal Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	- Rasio Kemandirian Keuangan Daerah - Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah - Rasio Desentralisasi Fiskal	Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian, uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana, serta analisis regresi linier berganda	- Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah - Dana Perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah - Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah -Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2	Saleh (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	Variabel Independen: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	- Kemakmuran -Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah -Rasio Kemandirian	Penelitian ini menggunakan Pengolahan dan analisis data setiap variabel yang digunakan dalam penelitian, baik variabel-variabel independen maupun variabel dependen, akan menggunakan Microsoft Office Excel 2010 untuk mengetahui perkembangan data kuantitatif setiap variabel dari tahun ke tahun.	- Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah - Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. - Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah secara bersama-sama.

3	Tjahjono & Oktavianti, (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi DIY	Variabel Independen: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	- Rasio Kemandirian - Rasio Efektivitas	Penelitian ini menggunakan Teknik pengambilan sampel dan pengumpulan data populasi, analisis deskriptif serta analisis inferensial.	- Rasio Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. - Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
4	Ridla (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia	Variabel Independen: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	- Rasio Pendapatan Asli Daerah - Rasio Belanja Modal - Rasio Kemandirian	Penelitian ini menggunakan metode analisis uji asumsi klasik, uji hipotesis yang diolah menggunakan bantuan <i>softwer</i> statistik SPSS.	- PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah - DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah - DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah - Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah - Total aset berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah - PAD, DAU, DAK, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah secara simultan atau bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah.
5.	Ernawati & Riharjo (2017)	Variabel Independen:	- Rasio Kemandirian	Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif	- Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)</p>	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Belanja Pegawai</p> <p>Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<p>- Rasio Efektivitas</p> <p>- Rasio Belanja Modal</p> <p>- Rasio Belanja Pegawai</p>	<p>bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda.</p>	<p>- Belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p> <p>- Pendapatan asli daerah, belanja modal, dan belanja pegawai yang hanya mampu menjelaskan 59,1% faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.</p>
6	<p>Yulihantini., et al. (2018) Pengaruh Belanja Modal Dan Alokasi Dana Desaterhadap Kemandirian Dan Kinerja Keuangan Desadi Kabupaten Jember</p>	<p>Variabel Independen: Pengaruh Belanja Modal dan Alokasi Dana Desa</p> <p>Variabel Dependen: Kemandirian dan Kinerja Keuangan</p>	<p>- Rasio Kinerja Keuangan Daerah</p> <p>- Rasio Efektivitas</p> <p>- Rasio Efisiensi</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode analisis data menentukan nilai variabel bebas, menentukan variabel terikat dan variabel antara (intervening) menggunakan rumus rasio keuangan dan analisis jalur (<i>path analysis</i>).</p>	<p>- Belanja modal dalam mempengaruhi efektifitas kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember berpengaruh negatif</p> <p>- ADD tidak menentukan peningkatan relatif realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan desa</p> <p>- Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten Jember. ADD tidak mempunyai dampak terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten Jember. Jumlah ADD yang diterima dan direalisasikan desa tidak membantu mencapai kemandirian keuangan desa. Belanja modal secara langsung berpengaruh negatif terhadap efektifitas kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember. belanja modal melalui ADD tidak dapat</p>

					menentukan efektifitas kinerja keuangan.
7	Dermawan, (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen: Belanja Daerah	- Rasio Pendapatan Asli Daerah - Rasio Belanja Daerah	Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Uji Asumsi Klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas.	- Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014 – 2016 terus mengalami peningkatan - Perkembangan Belanja Daerah dari tahun 2014 – 2016 terus mengalami penurunan.
8	Darwis (2015) Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat)	Variabel Independen: Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	- Rasio Belanja Modal - Rasio Belanja Pegawai - Rasio Kemandirian	Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh dan uji asumsi klasik.	- Belanja modal berpengaruh dan signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah - Belanja pegawai berpengaruh dan signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
9	Ariani & Putri (2016) Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian	Variabel Independen: Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum	- Rasio Belanja Modal - Rasio Kemandirian	Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini akan diolah menggunakan metode statistik dengan program SPSS versi 20.0 <i>for windows</i> untuk	- Belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah - Dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

	Kuangan Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah)	Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah		menguji hipotesis dan variabel yang digunakan. Data tersebut diolah dengan menggunakan analisa regresi linear berganda.	
10	Ernawati & Riharjo, (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal terhadap kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah	- Rasio Belanja Modal - Rasio Kemandirian - Rasio Efektivitas	Penelitian ini menggunakan metode analisis yang digunakan yaitu analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS 23. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu variabel.	- Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan - Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

2.7.2 Kerangka Pemikiran

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan:

2.7.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dalam bentuk satuan moneter yang diterima oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang diusahakan sendiri oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Menurut Ernawati & Riharjo (2017), kinerja Pendapatan Asli Daerah dapat diukur menggunakan rasio efektivitas yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, menggambarkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang semakin baik. Artinya daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya dan ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat berkurang. Peneliti Ernawati (2017) dan Rahmat Saleh (2018) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan.

2.7.2.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan

Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Halim & Kusufi, 2014). Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola belanja modal dengan baik dan tepat sasaran agar pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal. Pengelolaan belanja modal yang optimal membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan rakyat agar memberikan kepuasan bagi publik serta dapat mendukung terciptanya kemandirian keuangan daerah.

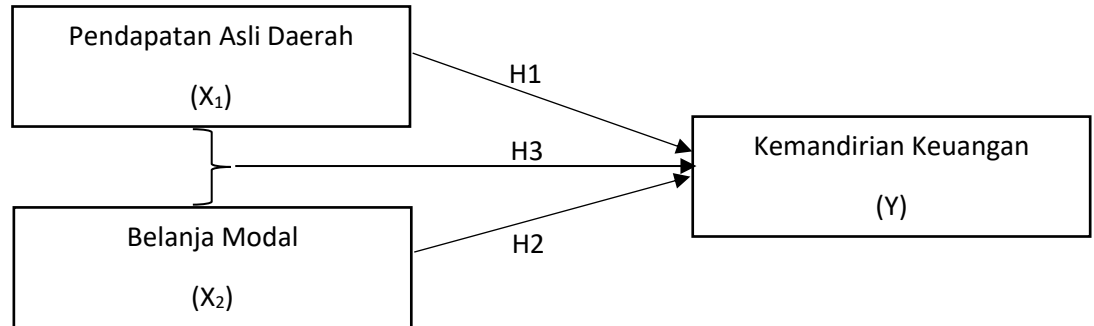
Peneliti (Ariani & Putri, 2016) dan (Ernawati & Riharjo, 2017) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan.

2.7.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan

Halim & Kusufi (2014), mengemukakan bahwa “Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Peneliti Ernawati (2017) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan dan belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Menurut Kurnia Rina Ariani., et al. (2016) dan Rahmat Saleh (2018) pendapatan asli daerah dan belanja modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Dari uraian diatas, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang kebenarannya harus diuji lebih lanjut dengan pengolahan data. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Hipotesis 1 :** Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan
- Hipotesis 2 :** Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan
- Hipotesis 3 :** Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal sebagai variabel independen dan Kemandirian Keuangan daerah Kota Bogor sebagai variabel dependen.

Unit analisis penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah geografis regional, maksud dari regional yang akan diteliti adalah daerah, sehingga data mengenai atau berasal dari respon suatu daerah tertentu titik lokasi penelitian yang dilakukan pada pemerintahan Kota Bogor.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data Yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, data kuantitatif metode yang berdasar filsafat positivisme bertujuan menggambarkan dan menguji hipotesis yang dibuat peneliti. Penelitian kuantitatif memuat banyak angka-angka mulai dari pengumpulan, pengolahan, serta hasil yang didominasi angka.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari website resmi pemerintahan Kota Bogor (www.kotabogor.go.id). Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.

3.4 Operasional Variabel

Variabel penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen), yang disimbolkan dengan simbol (X). Kemudian variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas).

Operasional variabel pada penelitian merupakan unsur penelitian yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini meliputi variabel (X1) yaitu Pendapatan Asli Daerah, variabel (X2) yaitu Belanja Modal, dan (Y) yaitu Kemandirian Keuangan. Teori ini

dipergunakan sebagai landasan atau alasan mengapa suatu yang bersangkutan memang bisa mempengaruhi variabel terikat atau merupakan salah satu penyebab.

Secara konsep operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat terlihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 1
Operasionalisasi Variabel
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian
Keuangan Kota Bogor 2015-2019

No	Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala Pengukuran
1	Independen (X ₁) Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektivitas PAD	$\text{Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Target penerimaan PAD}}{\text{yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}} \times 100\%$	Rasio
2	Independen (X ₂) Belanja Modal	Rasio Belanja Modal	$= \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	Rasio
3	Dependen (Y) Kemandirian Keuangan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{pinjaman})} \times 100\%$	Rasio

3.5 Metode Penarikan Sampel

Menurut Silaen (2018) “Populasi adalah keseluruhan dari objek atau individu yang memiliki karakteristik (sifat-sifat) tertentu yang akan diteliti. Populasi juga disebut *universum (universe)* yang berarti keseluruhan, dapat berupa benda hidup atau benda mati. Populasi tidak berkenaan dengan siapa tetapi juga berkenaan dengan apa yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan sample Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintahan Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2019, yang diperoleh dari website resmi Kota Bogor (www.kotabogor.go.id). Adapun teknik yang digunakan adalah *NonProbability* sampling yaitu teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan tidak sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel adalah *purposive* sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu sesuai dengan objek penelitian. Pertimbangan penelitian sampel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan Kota Bogor
2. Kemudahan dalam memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian
3. Laporan keuangan 5 tahun terakhir akan memberikan gambaran terbaru mengenai perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan. sehingga dapat terlihat pertumbuhan dari masing-masing variabel tersebut.
4. Laporan keuangan pada periode tersebut telah diaudit BPK.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen laporan realisasi anggaran APBD Kota Bogor, yang diperoleh dari situs resmi pemerintahan Kota Bogor (www.kotabogor.go.id). Dari laporan realisasi dan anggaran APBD ini diperoleh data mengenai Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah Belanja Modal.

3.7 Metode Pengolahan Data/Analisis Data

Berdasarkan data kuantitatif pada penelitian ini, maka metode yang digunakan yaitu berupa pengujian hipotesis Dengan menggunakan uji statistic (SPSS22). Metode yang digunakan dalam menganalisis data dengan langkah-langkah yaitu statistika deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis dan Analisis Regresi Linear Berganda.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Ghozali (2016) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness. Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan profil data sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk menguji hipotesis.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik atau tidak.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi data yang normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *kolmogorov smirnov*. Pengambilan kesimpulan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $\text{asyp, sig, (2-tailed)} > \alpha (0,05)$ maka data berdistribusi normal.
- b. Jika $\text{asyp, sig, (2-tailed)} < \alpha (0,05)$ maka data tidak berdistribusi normal.

Selain itu hasil uji normalitas dapat dibuktikan dengan analisis grafik antara lain menggunakan histogram dan *probability plot*. Dasar pengambilan keputusan uji

normalitas nya yaitu jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau bebas. Menurut Ghazali (2018: 105), tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik memiliki model yang di dalamnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinearitas dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi dapat dikatakan bebas dari problem multikolinearitas jika nilai VIF < 10 dan tol > 0,1.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas Ghazali (2016).

4. Uji Autokorelasi

Dalam Penelitian ini Uji Autokorelasi dilakukan dengan Run Test, Menurut Ghazali (2018: 121) Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Jika residual random (acak) yaitu nilai signifikansi di atas 0,05 maka dapat dikatakan antar residual tidak terdapat hubungan korelasi atau dapat dikatakan tidak terdapat gejala autokorelasi.

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Apabila semua data sudah memenuhi syarat asumsi klasik, maka selanjutnya data tersebut dapat dilakukan uji regresi. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh atau hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Model persamaan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + E$$

Keterangan:

Y	=	Variabel Dependen (Kemandirian Keuangan)
α	=	Konstanta
β	=	Koefisien
X_1	=	Variabel Independen (PAD)
X_2	=	Variabel Independen (Belanja Modal)
e	=	Error

3.7.4 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018:99). Dengan mengidentifikasi t hitung atas t tabel. Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka terjadi pengaruh secara parsial.

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Dengan mengidentifikasi F hitung atas F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka terjadi pengaruh secara simultan.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106° 48' BT dan 6° 26' LS, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata.

Luas Wilayah Kota bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kemudian Secara Administratif kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan dan 37 desa (lima diantaranya termasuk desa tertinggal yaitu desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT dan dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor.

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dilakukan analisa terhadap rasio pendapatan asli daerah (X1) yang diukur berdasarkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah, belanja modal (X2) dan kemandirian keuangan daerah (Y) pada periode 2015-2020. Berikut pada tabel 4.1 akan dipaparkan mengenai hasil analisa masing-masing variabel penelitian.

4.2.1 Data Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang bersal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim & Kusufi,2014). Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan daerah sesuai dengan yang ditargetkan, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Berikut ini data Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Bogor periode 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Rekapitulasi Data Pendapatan Asli Daerah Periode 2015-2020
(dalam milyar rupiah)

TAHUN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	627,60	783,37	978,20	912,20	1.015,88	872,18
TARGET						
PAD	627,82	728,03	917,79	887,40	927,61	741,54

Tabel 4. 2
Rasio Pendapatan Asli Daerah Periode 2015-2020

TAHUN / %					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	108%	107%	103%	110%	118%

Berdasarkan tabel 4.2 di atas tentang rasio efektivitas pendapatan asli daerah, diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan daerah terendah berada pada tahun 2015 dengan persentase sebesar 100% dan tertinggi pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 118% dengan nilai rata-rata sebesar 108%.

4.2.2 Data Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim & Kusufi,2014). Belanja daerah menurut Undang-undang RI No.33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berikut ini data Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bogor periode 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 3
Rekapitulasi Belanja Modal Periode 2015-2020
(dalam milyar rupiah)

Kategori	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA MODAL	440,92	552,48	433,49	455,46	501,03	276,16
TOTAL BELANJA DAERAH	1.862,98	2.115,30	2.245,59	2.406,59	2.526,50	2.353,74

Tabel 4. 4
Rasio Belanja Modal Periode 2015-2020

TAHUN / %					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
24%	26%	19%	19%	20%	12%

Berdasarkan tabel 4.4 tentang rasio belanja modal Pemerintah daerah Kota Bogor, diketahui bahwa rasio terendah berada pada tahun 2020 dengan nilai 12% dan tertinggi pada tahun 2016 dengan persentase sebesar 26% dengan nilai rata-rata sebesar 20%.

4.2.3 Data Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Dana Transfer adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berikut ini data Kemandirian Keuangan pada Pemerintah Kota Bogor periode 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5
Rekapitulasi Kemandirian Keuangan Periode 2015-2020
(dalam milyar rupiah)

Kategori	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	627,60	783,37	978,20	912,20	1.015,88	872,18
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.218,38	1.297,44	1.293,51	1.303,33	1.455,64	1.415,98

Tabel 4. 6
Rasio Kemandirian Keuangan Periode 2015-2020

TAHUN / %						
2015	2016	2017	2018	2019	2020	
52%	60%	76%	70%	70%	62%	

Tabel 4. 7
Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Daerah

Keterangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25%	Instruktif
Rendah	>25 – 50%	Konsultatif
Sedang	>50 – 75%	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100%	Delegatif

Sumber: Halim&Kusufi,2014

Berdasarkan tabel 4.6 di atas diketahui rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi pada tahun 2017 dengan persentase sebesar 76%. Sedangkan rasio kemandirian keuangan terendah berada pada tahun 2015 dengan persentase sebesar 52%. Dari data di atas maka tingkat kemandirian masuk dalam kategori partisipatif, di mana pada kategori tersebut tingkat campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan menilai sebaran data pada sebuah kelompok variabel berdistribusi normal atau tidak, pada uji ini dilakukan uji normalitas kolmogorov-smirnov, adapun asumsi dan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

Jika nilai signifikansi $> 0,05$ terima H_a berarti data berdistribusi normal

Jika nilai signifikansi $< 0,05$ terima H_0 berarti data tidak berdistribusi normal

Tabel 4. 8
Output Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.12611528
Most Extreme Differences	Absolute	.145
	Positive	.145
	Negative	-.103
Test Statistic		.145
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sesuai dengan kriteria dalam melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi atau probabilitas (*asym. sig. (2-tailed)*) lebih besar dari 0,05. Hasil olah data yang telah dilakukan menunjukkan nilai 0,200 lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data setelah transformasi telah berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat gejala korelasi di antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi. Regresi yang baik akan bebas dari multikolinearitas. Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dengan menggunakan nilai *tolerance* dan *Varian Inflation Factor* (VIF) pada model regresi. Regresi yang bebas dari gangguan multikolinearitas jika mempunyai nilai *tolerance* $>$ dari 0,1 atau nilai VIF $<$ dari 10. Berikut ini hasil uji multikolinearitas dari penelitian ini:

Tabel 4. 9
Output Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	12.884	14.179		.909	.430		
Pendapatan Asli Daerah	.006	.001	.931	4.460	.021	1.000	1.000
Belanja Modal	.001	.002	.075	.358	.744	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan
Sumber: SPSS 25, diolah penulis, 2022.

Dari hasil uji multikolinearitas di atas dapat dilihat bahwa nilai tolerance untuk kedua variabel lebih dari 0,1 yaitu pendapatan asli daerah dan belanja modal sebesar 1,000. Dan untuk nilai VIF kurang dari 10 yaitu pendapatan asli daerah dan belanja modal yaitu 1,000. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak memiliki masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan metode glejser, jika korelasi antara variabel independen dengan residual didapat nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode glejser dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 10
Output Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3.644E-8	.000		-.234	.830
PAD	2.772E-16	.000	.195	.219	.840
BM	.001	.001	.784	.880	.444

a. Dependent Variable: Abs_Res
Sumber: SPSS 25, diolah penulis, 2022.

Berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan metode glejser diperoleh Nilai signifikansi dari pendapatan asli daerah sebesar 0,840 dan Belanja modal sebesar 0,444. Kedua variabel tersebut memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan dengan Run Test, Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Jika residual random (acak) yaitu nilai signifikansi di atas 0,05 maka dapat dikatakan antar residual tidak terdapat hubungan korelasi atau dapat dikatakan tidak terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 4. 11
Output Uji Autokorelasi
Runs Test

Unstandardized Residual	
Test Value ^a	-.34260
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	3
Total Cases	6
Number of Runs	4
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Median

Sumber: SPSS 25, diolah penulis, 2022.

Hasil analisa menunjukkan bahwa uji run test memiliki nilai Asymp.Sig sebesar 1,000 > 0,05 maka berdasarkan kriteria pengambilan keputusan uji autokorelasi dinyatakan tidak terjadi gejala autokorelasi.

4.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk mengukur besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan variabel dependen atas dasar nilai variabel dependen. Dalam penelitian ini untuk mengukur pengaruh variabel dependen Penerimaan Kemandirian Keuangan yang dipengaruhi variabel independen PAD dan Belanja Modal.

Tabel 4. 12
Analisa Regresi Berganda

Model		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.884	14.179		.909	.430
	Pendapatan Asli Daerah	.006	.001	.931	4.460	.021
	Belanja Modal	.001	.002	.075	.358	.744

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan

Berdasarkan hasil analisis pada tabel maka dapat dibuat model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$
$$Y = 12,884 + 0,931 X_1 - 0,075 X_2 + e$$

Keterangan:

Y	=	Kemandirian Keuangan
α	=	Konstanta
β	=	Koefisien
X_1	=	PAD
X_2	=	Belanja Modal
e	=	Error

Interpretasi dari persamaan model regresi linier berganda di atas adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 12,884 artinya apabila PAD dan Belanja Modal nilainya nol, maka Penerimaan Kemandirian Keuangan nilainya sebesar 12,884.
2. Koefisien Regresi PAD bernilai positif sebesar 0,931, artinya setiap terjadi kenaikan PAD sebesar 1 satuan maka Kemandirian Keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,931 dengan asumsi variabel lainnya nilainya tetap.
3. Koefisien Belanja Modal bernilai positif sebesar 0,075, artinya setiap terjadi kenaikan Belanja Modal sebesar 1 satuan maka Kemandirian Keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,075 dengan asumsi variabel lainnya nilainya tetap.

4.3.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menjawab sementara mengenai rumusan masalah yang belum dibuktikan kebenarannya. Pengujian hipotesis terdiri dari uji koefisien secara parsial (uji t), uji koefisien regresi secara multan (uji F) dan uji koefisien determinasi (R^2).

1. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji koefisien regresi secara parsial untuk menguji signifikansi nilai koefisien regresi semua variabel independen dalam persamaan regresi, dengan melihat dari nilai t dan nilai signifikansi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Koefisien regresi masing-masing variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ dicari dengan signifikansi $0,05/2 = 0,025$ (uji dua sisi) dengan tingkat derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $df = 6-2-1 = 3$. Berikut ini hasil uji t dari penelitian ini dengan Kemandirian Keuangan sebagai variabel dependen.

Tabel 4. 13
Output Uji t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	12.884	14.179		.909	.430
	Pendapatan Asli Daerah	.006	.001	.931	4.460	.021
	Belanja Modal	.001	.002	.075	.358	.744

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan

Berdasarkan hasil uji t pada tabel, diperoleh hasil t_{hitung} untuk variabel PAD sebesar 4,460 dan Belanja Modal sebesar 0,358. Berikut penjelasan hasil uji t pada semua variabel di atas:

a. Variabel PAD (X1) terhadap Kemandirian Keuangan

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa PAD memiliki t_{hitung} sebesar 4,460 di mana nilai t_{hitung} 4,460 > t_{tabel} 3,182 dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,021 yang berarti H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan.

b. Variabel Belanja Modal (X2) terhadap Kemandirian Keuangan

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Belanja Modal memiliki t_{hitung} sebesar 0,358 di mana nilai t_{hitung} 0,358 < t_{tabel} 3,182 dengan tingkat signifikansi di atas 0,05 yaitu sebesar 0,744 yang berarti H2 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji koefisien regresi secara simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah PAD (X1) dan Belanja Modal (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan (Y). Variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansinya < dari 0,05. Berikut ini hasil uji f dari penelitian ini:

Tabel 4. 13
Output Uji Simultan

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	325.137	2	162.569	9.981	.047 ^b
	Residual	48.863	3	16.288		
	Total	374.000	5			

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah

3. Berdasarkan analisis uji F pada tabel dapat dilihat bahwa secara simultan variabel independen memiliki nilai sig < 0,05 yaitu 0,047 dan $F_{hitung} 9,981 > F_{tabel} 9,555$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PAD (X1) dan Belanja Modal (X2) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Kemandirian Keuangan (Y).

4. Uji Determinasi

Uji Determinasi atau ketepatan perkiraan model (*goodness of fit*) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dari nol sampai satu. Nilai R^2 yang kecil menentukan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Berikut ini hasil perhitungan R^2 dan koefisien determinasi dalam penelitian ini:

Tabel 4. 14
Output Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.832 ^a	.769	.682	4.03580

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah

Hasil tabel menjelaskan tentang ringkasan model, yang terdiri dari hasil nilai korelasi berganda (R), koefisien determinasi (R square), koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R square*) dan ukuran kesalahan prediksi (*std error of the estimate*), antara lain:

- a. R menunjukkan nilai korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar dari 0 sampai 1, jika nilai R mendekati 1 maka hubungan semakin kuat. Angka R yang didapat dalam penelitian ini adalah 0,832 yang berarti korelasi antar variabel PAD dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan sebesar 0,832. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang begitu erat antara variabel independen dengan variabel dependen.
- b. *R square* (R^2) untuk menunjukkan koefisien determinasi yaitu persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen jika dalam regresi menggunakan tidak lebih dari dua variabel dependen. Nilai *R Square* sebesar 0,769 yang berarti bahwa variabel independen (PAD dan Belanja Modal) mempengaruhi variabel dependen (Kemandirian Keuangan)

sebesar 76,9% dan sisanya sebesar 23,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisa di atas, maka berikut disajikan tentang pembahasan hasil tersebut sebagai berikut:

4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan

Hasil analisa menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim & Kusufi, 2014). Pendapatan asli daerah menunjukkan berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi kemandirian daerah, berarti keadaan tersebut menyatakan bahwa Pemda Kota Bogor sudah mampu untuk melakukan otonomi daerah dan ikut campur pemerintah dalam subsidi keuangan daerah mulai berkurang. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya dari Pratiwi (2018) Saleh (2020) di mana pada penelitian sebelumnya tersebut pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan. Sedangkan hasil penelitian ini menolak hasil penelitian dari Tjahjono & Oktavianti, (2017) Ridla (2018) Ernawati & Riharjo (2017) bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan.

4.4.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah. Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam mengelola belanja modal ini pemerintah daerah harus didasarkan ada prinsip efektivitas, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah. Dalam realisasinya belanja modal tidak berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif dengan kemandirian keuangan, berarti efektifitas belanja modal pada periode tersebut tidak dapat membuat Pemda Bogor Kota mendapatkan keuntungan dari nilai investasinya tersebut sehingga menimbulkan pemborosan atau tidak efisiennya belanja modal dalam menghasilkan keuntung bagi Pemda Bogor Kota. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya dari Yulihantini., et al. (2018) Darwis (2015) bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian modal dengan arah

hubungan negative. Sedangkan hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya dari Ariani & Putri (2016) Ernawati & Riharjo, (2017) bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan.

4.4.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendukung terbesar dalam menentukan kemandirian keuangan, dalam keadaan tersebut peranan subsidi dari pemerintah dan pinjaman mulai berkurang, walaupun dengan kemampuan daerah atas kemandirian keuangannya tersebut dalam menentukan kemandirian keuangan terjadi pemborosan di sektor belanja modal masih dapat tertutupi dengan besarnya pendapatan asli daerah yang dihasilkan Pemda Bogor Kota dan tidak menurunkan kemandirian keuangannya. Keadaan tersebut akan berpengaruh dalam mencapai taraf otonomi daerah sehingga campur tangan pemerintah pusat dan provinsi sudah menurun atau bahkan tidak dibutuhkan lagi dalam kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini menolak hasil penelitian dari Tjahjono & Oktavianti, (2017) Ridla (2018) Ernawati & Riharjo (2017) bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan dan Yulihantini et al. (2018) Darwis (2015) bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian modal dengan arah hubungan negatif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada tahap kuantitatif dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah menemukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui pendapatan asli daerah dan belanja modal. Berikut kesimpulan yang didapatkan:

1. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t di mana nilai $t_{hitung} 4,460 > 3,182$ dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0,021. Hal ini sesuai dengan H1 yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan.
2. Secara parsial, Belanja Modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t di mana nilai $t_{hitung} 0,358 < t_{tabel} 3,182$ dengan tingkat signifikansi di atas 0,05 yaitu 0,744. Hal ini sesuai dengan H2 yang menyatakan bahwa Belanja Modal tidak Berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan.
3. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji F di mana Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal memiliki nilai $F_{hitung} 9,981 > F_{tabel} 9,555$ dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0,047. Hal ini sesuai dengan H3 yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan permasalahan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan (Studi Pada Pemerintah Kota Bogor) yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Bogor

Pemerintah Kota Bogor dapat mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan dalam hal ini Pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan, sehingga disarankan agar Pemerintah Kota Bogor lebih intens dalam menyadarkan masyarakat akan pembayaran pajak, Selain itu disarankan agar lebih mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan serta administrasi publik, agar masyarakat dapat lebih banyak menyumbang retribusi dari biaya perizinan serta pelayanan publik yang berguna sebagai penyumbang

Pendapatan asli daerah. Diketahui bahwa Belanja modal memiliki hubungan dengan arah negatif, sehingga disarankan agar Pemerintah Kota Bogor dapat lebih selektif dalam mengeluarkan anggaran untuk belanja modal sebagai investasi daerah dalam menghasilkan keuntungan bagi keuangan daerah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan kepada peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan topik yang sama atau serupa, agar menambahkan perbandingan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, khusus dan dana bagi hasil sehingga dapat diketahui perbandingan aspek-aspek tersebut dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada periode penelitian yang relatif pendek yaitu 5 tahun. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menambah periode penelitian agar diperoleh hasil yang lebih akurat dan memperluas sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Muhammad Syam Kusufi (2014) *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Antari, N. P. G. S. and Sedana, I. B. P. (2018) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah', *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), p. 1080. doi: 10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19.
- Ariani, K. R. and Putri, G. A. (2016) 'Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah', *Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper*, pp. 364–369.
- Darwis, E. T. R. (2015) 'Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat', pp. 1–23.
- Dermawan, W. D. (2018) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat)', *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 5(2), pp. 153–156. doi: 10.25157/je.v5i2.963.
- Ernawati and Riharjo, I. B. (2017) 'Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(2), pp. 531–545.
- Imam Ghozali (2016) *Aplikasi analisis multivariate v dengan program IBM SPSS23 (edisi 8)*. 8th edn. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mahmudi (2016) *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- 'Pemandagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah' (2006).
- Pemerintah, S. A. (2010) 'Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 2 Tahun 2010'.
- Peraturan Pemerintah RI (2005) 'Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah'.
- Peraturan Pemerintah RI (2010) 'Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010'.
- Pratiwi, T. Y. (2018) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016', *Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018*.
- Ridla, A. L. (2018) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia', *Universitas Islam Negeri*, p. 1080.
- Saleh, R. (2020) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah', *Equity*, 22(2), p. 197. doi: 10.34209/equ.v22i2.936.

Tjahjono, A. and Oktavianti, R. (2017) ‘Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi DIY’, *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 24(1), pp. 25–34. doi: 10.32477/jkb.v24i1.215.

Undang-Undang RI (2009) ‘Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah’.

Undang-undang RI (1999) ‘Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah’.

Undang-undang RI (2004) ‘Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah’.

Undang-undang RI (2014) ‘Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah’.

www.kotabogor.go.id.

Yulihantini, D. T., Sukarno, H. and Wardayati, S. M. (2018) ‘Pengaruh Belanja Modal Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemandirian Dan Kinerja Keuangan Desa Di Kabupaten Jember’, *Bisma*, 12(1), p. 37. doi: 10.19184/bisma.v12i1.7600.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jogi Rahmat Santoso
Alamat : Jl. Kidung Gede Blok G.9 No.4 Rt.03/09 Bogor
Utara Kota Bogor
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 04 September 1998
Agama : Islam
Pendidikan
• SD : SDN Sindang Sari Bogor
• SMP : MTSN Cibinong
• SMA : SMA IT Al-Madinah
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Mei2022
Peneliti,

(Jogi Rahmat S)

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Tabel Laporan Keuangan 2015-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal	Rasio Kemandirian	Pendapatan Transfer	Target PAD	Belanja Daerah
2015	627.597.050.141	440.919.551.227	0,52	1.218.375.878.985	627.815.080.243	1.862.982.871.234
2016	783.873.587.219	552.484.517.036	0,60	1.297.444.479.820	728.030.823.933	2.115.296.888.270
2017	978.197.741.947	433.491.716.724	0,76	1.293.505.562.261	917.788.606.450	2.245.590.002.913
2018	912.197.971.288	455.461.723.593	0,70	1.303.332.063.609	887.396.041.682	2.406.586.936.843
2019	1.015.884.216.919	501.033.407.778	0,70	1.455.644.350.874	927.607.288.978	2.526.504.949.919
2020	872.017.242.152	276.157.283.029	0,62	1.415.498.666.396	741.531.123.021	2.353.736.171.982

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja tahun 2015-2016



PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

NO URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2015 (AUDITED)
1	PENDAPATAN	5.1.1	2.158.083.504.950,00	2.152.370.082.886,00	99,74	1.913.210.404.036,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	728.030.823.933,00	783.873.587.219,00	107,67	627.597.050.141,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	465.600.000.000,00	492.138.653.391,00	105,70	398.435.398.328,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.1	56.330.262.700,00	62.727.631.456,00	111,36	46.219.894.849,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.1	32.768.361.795,00	33.107.211.225,00	101,03	28.807.740.268,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.1	173.332.199.438,00	195.900.091.147,00	113,02	154.134.016.696,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.352.588.061.017,00	1.297.444.479.820,00	95,92	1.218.375.878.985,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	1.146.551.930.117,00	1.097.614.311.436,00	95,73	814.953.434.916,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	75.704.574.000,00	74.818.598.774,00	98,83	50.436.407.660,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2.1.2	20.733.293.000,00	22.024.549.634,00	106,23	18.067.309.256,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	718.517.152.117,00	806.089.544.000,00	112,19	737.833.158.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	331.596.911.000,00	194.681.619.028,00	58,71	8.616.560.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	202.799.344.000,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	202.799.344.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3	206.036.130.900,00	199.830.168.384,00	96,99	200.623.100.069,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	206.036.130.900,00	199.830.168.384,00	96,99	200.623.100.069,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	77.464.620.000,00	71.052.015.847,00	91,72	67.237.474.910,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	3.000.000.000,00	14.106.000.000,00	470,20	4.875.000.000,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	74.464.620.000,00	56.946.015.847,00	76,47	62.362.474.910,00
2	BELANJA	5.1.2	2.425.741.193.905,00	2.115.296.888.270,00	87,20	1.862.982.871.234,00
2.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.699.787.722.192,00	1.556.442.743.532,00	91,57	1.417.208.614.587,00
2.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.136.249.253.519,00	1.044.030.978.405,00	91,88	956.968.389.834,00
2.1.2	Belanja Barang	5.1.2.1.2	530.892.764.217,00	483.099.789.155,00	91,00	384.060.724.979,00
2.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	4.938.951.956,00	2.646.198.572,00	53,58	2.415.905.429,00
2.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	27.656.752.500,00	26.636.028.500,00	96,31	42.891.089.240,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	50.000.000,00	29.748.900,00	59,50	30.872.505.105,00
2.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	701.582.651.180,00	552.484.517.036,00	78,75	440.919.551.227,00
2.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	10.884.000.000,00	9.338.193.940,00	85,80	8.347.295.355,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	113.085.483.925,00	101.623.727.575,00	89,86	88.426.943.379,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	219.390.311.714,00	156.173.673.849,00	71,19	95.466.281.082,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	357.916.175.341,00	285.046.941.672,00	79,64	247.091.808.411,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	306.680.200,00	301.980.000,00	98,47	1.587.223.000,00

NO URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2015 (AUDITED)
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	23.255.577.341,00	5.370.006.482,00	23,09	3.855.084.200,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	23.255.577.341,00	5.370.006.482,00	23,09	3.855.084.200,00
2.4	TRANSFER	5.1.3	1.115.203.192,00	999.621.220,00	89,64	999.621.220,00
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	5.1.3	1.115.203.192,00	999.621.220,00	89,64	999.621.220,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3	1.115.203.192,00	999.621.220,00	89,64	999.621.220,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		(267.657.648.955,00)	37.073.194.616,00	(13,85)	50.227.532.802,00
3	PEMBIAYAAN	5.1.4				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	5.1.4.1	340.511.328.955,00	340.597.623.600,00	100,03	301.204.906.314,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.1.4.1	339.575.280.955,00	339.661.575.600,00	100,03	300.704.906.314,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	5.1.4.1	936.048.000,00	936.048.000,00	100,00	500.000.000,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	5.1.4.2	72.853.680.000,00	72.853.680.000,00	100,00	11.857.158.161,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.4.2	71.917.632.000,00	71.917.632.000,00	100,00	10.921.110.161,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.2	936.048.000,00	936.048.000,00	100,00	936.048.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO		267.657.648.955,00	267.743.943.600,00	100,03	289.347.748.153,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	304.817.138.216,00	0,00	339.575.280.955,00



Lampiran 3 : Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja tahun 2017-2018



PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

NO URUT	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2017 (AUDITED)
1	PENDAPATAN	5.1.1	2.334.692.104.183,00	2.328.703.432.668,85	99,74	2.289.359.362.675,33
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	887.396.041.682,00	912.197.971.288,85	102,79	978.197.741.947,33
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1	578.700.000.000,00	592.978.746.862,00	102,47	555.475.409.588,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1	44.449.594.000,00	48.418.070.315,00	108,93	49.043.299.929,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1	27.969.394.780,00	26.772.427.406,00	95,72	29.949.487.128,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1	236.276.852.902,00	244.028.726.705,85	103,28	343.729.545.302,33
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.329.137.583.755,00	1.303.332.063.609,00	98,06	1.293.505.562.261,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2	1.087.823.566.000,00	1.066.762.734.201,00	98,06	1.072.486.473.770,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2	83.996.938.000,00	70.988.926.350,00	84,51	90.543.462.995,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2	20.180.539.000,00	23.969.468.586,00	118,78	0,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2	791.929.143.000,00	791.929.143.000,00	100,00	791.929.143.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2	191.716.946.000,00	179.875.196.265,00	93,82	190.013.867.775,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2	241.314.017.755,00	236.569.329.408,00	98,03	221.019.088.491,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2	241.314.017.755,00	236.569.329.408,00	98,03	221.019.088.491,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	118.158.478.746,00	113.173.397.771,00	95,78	17.656.058.467,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	92.126.747.546,00	87.142.218.371,00	94,59	9.000.000.000,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3	26.031.731.200,00	26.031.179.400,00	100,00	8.656.058.467,00
2	BELANJA	5.1.2	2.656.280.650.160,71	2.406.586.936.843,04	90,60	2.245.590.002.913,62
2.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2.118.814.639.370,71	1.945.831.266.176,04	91,84	1.806.456.260.619,62
2.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1	1.195.970.034.526,71	1.108.690.038.689,00	92,70	1.030.115.640.840,16
2.1.2	Belanja Barang	5.1.2.1	749.808.967.659,00	672.795.038.324,21	89,73	666.457.980.054,46
2.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1	7.000.000.000,00	6.598.058.977,83	94,26	5.685.279.325,00
2.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1	122.276.492.285,00	118.993.313.285,00	97,31	75.813.412.400,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1	43.759.144.900,00	38.774.816.900,00	88,61	28.383.948.000,00
2.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	512.432.788.564,00	455.461.723.593,00	88,88	433.491.716.724,00
2.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.2	10.111.980.000,00	9.314.649.200,00	92,11	1.426.177.314,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2	111.358.670.675,00	101.665.269.154,00	91,30	100.771.500.035,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2	71.633.896.252,00	66.483.846.768,00	92,81	145.187.264.010,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2	316.573.318.774,00	276.223.614.766,00	87,25	185.381.517.846,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2	2.754.922.863,00	1.774.343.705,00	64,41	725.257.519,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	19.876.006.034,00	1.557.079.950,00	7,83	2.270.085.956,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	19.876.006.034,00	1.557.079.950,00	7,83	2.270.085.956,00

NO URUT	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2017 (AUDITED)
2, 4	TRANSFER	5.1.3	5.157.216.192,00	3.716.867.124,00	72,07	3.371.939.614,00
2, 4, 1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	5.1.3	5.157.216.192,00	3.716.867.124,00	72,07	3.371.939.614,00
2, 4, 1, 3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3	5.157.216.192,00	3.716.867.124,00	72,07	3.371.939.614,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		(321.588.545.977,71)	(77.883.504.174,19)	24,22	43.769.359.761,71
3	PEMBIAYAAN	5.1.4				
3, 1	PENERIMAAN DAERAH	5.1.4.1	333.288.545.977,71	388.671.502.466,71	116,62	305.753.186.216,00
3, 1, 1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.1.4.1	330.288.545.977,71	330.288.545.977,71	100,00	304.817.138.216,00
3, 1, 4	Pinjaman Dalam Negeri		0,00	55.640.573.400,00		0,00
3, 1, 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.1	3.000.000.000,00	2.742.383.089,00	91,41	936.048.000,00
3, 2	PENGELUARAN DAERAH	5.1.4.2	11.700.000.000,00	54.223.415.589,00	463,45	19.234.000.000,00
3, 2, 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.4.2	8.700.000.000,00	8.700.000.000,00	100,00	19.234.000.000,00
3, 2, 4	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.2	3.000.000.000,00	45.523.415.589,00	1.517,45	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO		321.588.545.977,71	334.448.086.877,71	104,00	286.519.186.216,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	256.564.582.703,52	0,00	330.288.545.977,71



lampiran 4 : Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja tahun 2019-2020



PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMDA
TAHUN ANGGARAN 2020
PERIODE : 01 JANUARI 2020 S/D 31 DESEMBER 2020

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	741.531.123.201,00	872.017.242.152,12	117,60	1.015.884.216.919,81
3	Pendapatan Pajak Daerah	440.000.000.000,00	509.039.468.746,00	115,69	689.543.006.040,01
4	Pendapatan Retribusi Daerah	36.691.027.400,00	35.010.375.259,00	95,42	51.362.153.192,01
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.520.905.570,00	31.927.293.792,00	95,25	28.241.844.911,01
6	Lain-lain PAD yang Sah	231.319.190.231,00	296.040.104.355,12	127,98	246.737.212.776,81
7	PENDAPATAN TRANSFER	1.453.476.644.604,00	1.415.498.666.396,00	97,39	1.455.644.350.874,01
8	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.086.295.148.560,00	1.083.171.964.899,00	99,71	1.106.494.405.814,01
9	Dana Bagi Hasil Pajak	74.511.394.093,00	86.344.563.026,00	115,88	53.495.246.384,01
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	40.430.777.107,00	38.670.158.675,00	95,65	24.159.177.895,01
11	Dana Alokasi Umum	769.048.963.000,00	762.556.115.000,00	99,16	838.948.449.000,01
12	Dana Alokasi Khusus	202.304.014.360,00	195.601.128.198,00	96,69	189.891.532.535,01
13	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	28.928.586.000,00	28.928.586.000,00	100,00	41.073.011.000,01
14	Dana Penyesuaian	28.928.586.000,00	28.928.586.000,00	100,00	41.073.011.000,01
15	Transfer Pemerintah Provinsi	255.593.262.838,00	222.967.276.647,00	87,24	252.139.954.160,01
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	255.593.262.838,00	222.967.276.647,00	87,24	252.139.954.160,01
17	Bantuan Keuangan	82.659.647.206,00	80.430.838.850,00	97,30	55.936.979.900,01
18	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	167.951.500.000,00	141.063.595.101,00	83,99	88.328.640.000,01
19	Pendapatan Hibah	167.951.500.000,00	141.063.595.101,00	83,99	88.328.640.000,01
20	JUMLAH PENDAPATAN	2.362.959.267.805,00	2.428.579.503.649,12	102,78	2.559.857.207.793,86
21	BELANJA				
22	BELANJA OPERASI	2.175.216.112.217,19	1.951.301.711.023,00	89,71	2.025.462.086.541,15
23	Belanja Pegawai	1.134.564.423.225,19	1.010.111.841.189,00	89,03	1.181.889.361.829,01
24	Belanja Barang	859.382.967.805,00	798.841.580.650,00	92,96	711.101.422.815,15
25	Bunga	8.010.000.000,00	5.427.749.091,00	67,76	6.578.046.142,01
26	Hibah	128.766.006.687,00	93.233.837.587,00	72,41	79.149.334.000,01
27	Bantuan Sosial	44.492.714.500,00	43.686.702.506,00	98,19	46.743.921.755,01
28	BELANJA MODAL	307.168.807.801,00	276.157.283.029,00	89,90	501.033.407.778,01
29	Belanja Tanah	7.400.700.000,00	2.772.077.406,00	37,46	18.044.020.000,01
30	Belanja Peralatan dan Mesin	143.259.350.921,00	129.790.481.108,00	90,60	99.754.707.372,01
31	Belanja Gedung dan Bangunan	35.666.473.387,00	30.694.955.339,00	86,06	144.703.165.317,01
32	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	117.689.262.659,00	109.784.631.171,00	93,28	235.965.307.071,01
33	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.797.647.834,00	1.789.184.630,00	99,53	1.910.823.018,01
34	Belanja Aset Lainnya	1.355.373.000,00	1.325.953.375,00	97,83	655.385.000,01
35	BELANJA TAK TERDUGA	158.643.578.040,00	126.277.177.930,00	79,60	9.455.600,01
36	Belanja Tak Terduga	158.643.578.040,00	126.277.177.930,00	79,60	9.455.600,01
37	JUMLAH BELANJA	2.641.028.498.058,19	2.353.736.171.982,00	89,12	2.526.504.949.919,19

38	TRANSFER				
39	TRANSFER/BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	1.134.531.000,00	1.134.531.000,00	100,00	1.995.853.019,00
42	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1.134.531.000,00	1.134.531.000,00	100,00	1.023.845.129,00
43	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	972.007.890,00
44	JUMLAH TRANSFER	1.134.531.000,00	1.134.531.000,00	100,00	1.995.853.019,00
45	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.642.163.029.058,19	2.354.870.702.982,00	89,13	2.528.500.802.938,19
46	SURPLUS / (DEFISIT)	(279.203.761.253,19)	73.708.800.667,12	(26,40)	31.356.404.855,67
47	PEMBIAYAAN				
48	PENERIMAAN DAERAH	388.159.958.113,19	334.337.716.975,19	86,13	401.802.129.830,52
49	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	277.662.925.853,19	277.640.687.080,19	99,99	256.564.582.703,52
50	Pinjaman Dalam Negeri	75.000.000.000,00	32.159.096.032,00	42,88	139.752.780.949,00
51	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	99,78	5.484.766.178,00
52	Penerimaan Kembali Piutang Daerah	30.000.000.000,00	19.053.167.687,00	63,51	0,00
53	PENGELUARAN DAERAH	108.956.196.860,00	80.545.341.402,00	73,92	155.495.608.833,00
54	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	28.459.164.600,00	24.300.000.000,00	85,39	16.000.000.000,00
55	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	80.497.032.260,00	56.245.341.402,00	69,87	139.495.608.833,00
56	PEMBIAYAAN NETTO	279.203.761.253,19	253.792.375.573,19	90,90	246.306.520.997,52
57	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	327.501.176.240,31	0,00	277.662.925.853,19